



DIBELI PEMKOT, DIMANFAATKAN WARGA

# Yogya Tambah 3 Ruang Terbuka Hijau

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya bakal menambah tiga Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik berbasis perkampungan. Masing-masing dua lokasi di wilayah Giwangan dan satu lokasi di Semaki. Setelah dibeli oleh pemkot dan dibangun fasilitas, pemanfaatannya diserahkan kembali ke masyarakat.

Sesuai dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam kurun waktu lima tahun pada 2012-2016, sudah ditargetkan ada 10 RTH publik yang dibangun. "Hingga tahun kemarin sudah terealisasi lima RTH publik. Tahun ini, hasil dari kesepakatan APBD Perubahan ada tambahan tiga unit. Sehingga tahun depan kami tinggal mengadakan dua unit lagi," terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Kota Yogya, Drs Zenni Lingga, Minggu (27/9).

Meski realisasi APBD Perubahan masih menunggu proses evaluasi dari Gubernur, namun imbuhan Zenni, pihaknya tengah menyusun dokumen perencanaan. Sehingga begitu evaluasi atas APBD Perubahan

tuntas, tahapan pembelian lahan bisa langsung dilakukan. Hal ini lantaran sisa waktu penggunaan anggaran hanya menyisakan waktu tiga bulan efektif.

Tahapan pembelian lahan tersebut turut melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Diakuinya, banyak proposal penawaran lahan dari wilayah, namun tidak semua dapat disetujui. "Kami harus melakukan verifikasi. Terutama menyangkut status lahan apakah bermasalah atau tidak. Kemudian terkait harga yang harus disesuaikan dengan hasil appraisal. Jika di atas appraisal, kami tidak berani karena musyawarah dengan pemilik lahan kami ke depankan," paparnya.

Luas minimal RTH publik berbasis per-

kampungan yang dibeli pemkot ialah 200 meter persegi. Namun selama ini pembeliannya selalu di atas batas minimal dari yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal). Setelah lahan menjadi aset pemkot, lantas dibangun berbagai fasilitas sesuai kebutuhan warga.

Jika warga setempat yang diakomodir oleh LPMK menghendaki dibangun ruang pertemuan, maka pemkot akan memfasilitasi. Batas maksimal bangunan pada RTH publik pun hanya 40 persen dari total lahan. Hal ini supaya sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka.

"Fasilitasnya beragam. Bisa gedung pertemuan warga, fasilitas permainan atau yang lain. Selain itu juga akan diberi jaringan internet gratis. Setelah fasilitas selesai dibangun dan siap dimanfaatkan, langsung kami serahkan ke warga melalui LPMK. Harapannya benar-benar dimanfaatkan sebagai wahana interaksi sosial," jelas Zenni. **(Dhi)-a**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005